

BAB 2

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kota Balikpapan

Balikpapan adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia, dan merupakan kota terbesar kedua setelah Samarinda. Kota ini merayakan hari jadinya pada 10 Februari 1897, yang bertepatan dengan pengeboran sumur minyak pertama di daerah tersebut, suatu peristiwa yang juga tercatat dalam Seminar Sejarah Kota Balikpapan pada 1 Desember 1984. Dengan luas wilayah mencapai 843,48 kilometer persegi, Balikpapan terbagi menjadi 503,30 kilometer persegi daratan dan 340,18 kilometer persegi perairan. Sebagai pusat transportasi utama, Balikpapan memiliki pelabuhan laut terbesar, Pelabuhan Samayang, serta Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Suleiman, yang menjadikannya sebagai hub penting di Kalimantan Timur. Letaknya yang strategis juga menjadikan Balikpapan sebagai pintu gerbang menuju Ibu Kota Nusantara (IKN).

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan 2021-2026 (Pemerintah Kota Balikpapan, 2021), Kota Balikpapan memiliki visi “Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman”, dengan beberapa misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi
3. Menyediakan infrastruktur kota yang memadai
4. Mewujudkan kota nyaman dihuni yang berwawasan lingkungan
5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif

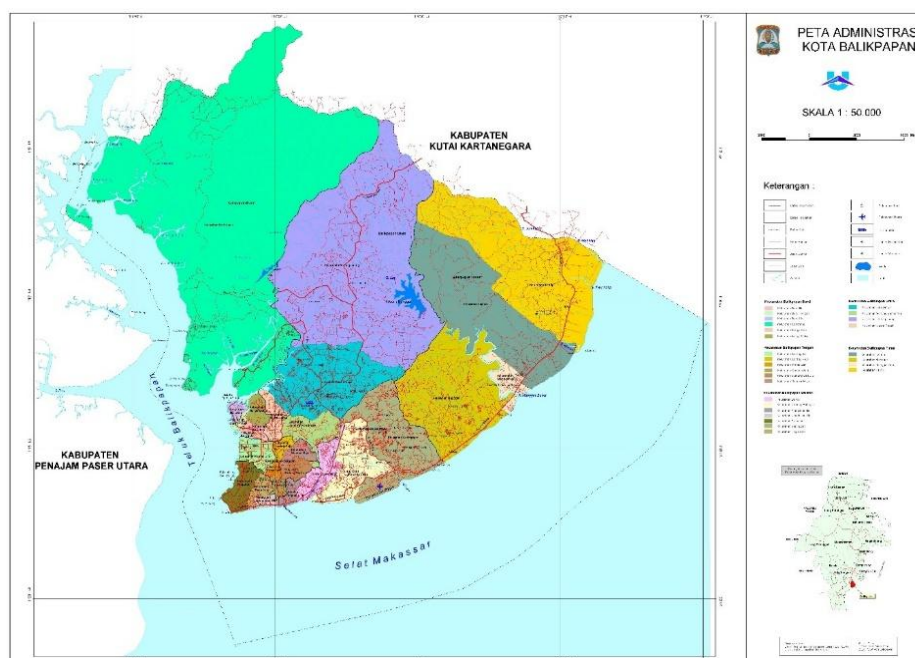
2.1.1 Kondisi Geografis Kota Balikpapan

Secara geografis, Kota Balikpapan terletak pada posisi 116,5 Bujur Timur dan 117,0 Bujur Timur serta diantara 1,0 Lintang Selatan dan 1,5 Lintang Selatan. Kota Balikpapan berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kertanegara
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Makassar
- Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makassar
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1996, Kota Balikpapan terdiri dari 5 kecamatan dan 27 kabupaten. Namun sejak diundangkannya Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan 7 Kecamatan Dalam Kawasan Kota Balikpapan dan Peraturan Daerah Perubahan Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Jalan-jalan di Kota Balikpapan Dalam Wilayah Kota Balikpapan, kini Kota Balikpapan terdiri dari 6 kelurahan dan 34 kelurahan, sebagai berikut:

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Balikpapan



Sumber: Balikpapan.go.id

Tabel 2.1 Luas Wilayah dan Jumlah Kelurahan Kota Balikpapan

No.	Kelurahan	Luas Wilayah (Ha)
Kecamatan Balikpapan Selatan		3.880,97
1	Damai Baru	215,53
2	Damai Bahagia	375,63
3	Sepinggan Baru	1.063,70
4	Sungai Nangka	319,95
5	Sepinggan Raya	662,58
6	Gunung Bahagia	373,86
7	Sepinggan	869,72
Kecamatan Balikpapan Kota		1.109,82
1	Prapatan	442,47
2	Telaga Sari	176,39
3	Klandasan Ulu	106,97
4	Klandasan Ilir	161,67
5	Damai	222,31
Kecamatan Balikpapan Timur		11.915,52
1	Manggar	3.303,73
2	Manggar Baru	521,35
3	Lamaru	3.607,02
4	Teritip	4.483,42
Kecamatan Balikpapan Tengah		1.082,58
1	Gunung Sari Ilir	108,51
2	Gunung Sari Ulu	205,61
3	Mekar Sari	72,37
4	Karang Rejo	121,90
5	Sumber Rejo	216,10
6	Karang Jati	358,10
Kecamatan Balikpapan Barat		19.288,02
1	Baru Ilir	71,31
2	Margo Mulyo	197,07
3	Marga Sari	56,94
4	Baru Tengah	91,25
5	Baru Ulu	121,21
6	Kariangau	18.750,25
Kecamatan Balikpapan Utara		13.824,34
1	Gunung Samarinda	266,42
2	Muara Rapak	316,71
3	Batu Ampar	780,04
4	Karang Joang	10.232,37
5	Gunung Samarinda Baru	266,42
6	Graha Indah	1.924,59
Total Luas		51.101,24

Sumber: BPS Kota Balikpapan

2.1.2 Kondisi Demografis Kota Balikpapan

Perubahan dalam jumlah penduduk suatu daerah seringkali terjadi. Hal ini sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kematian, kelahiran, dan pergerakan orang masuk dan keluar wilayah.

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Kota Balikpapan dari Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Penduduk
2019	655.178
2020	688.318
2021	695.287
2022	703.611
2023	738.532

Sumber: BPS Kota Balikpapan

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Kota Balikpapan Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2023

Kecamatan	Jumlah Penduduk		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Balikpapan Selatan	80.416	77.904	158.320
Balikpapan Kota	43.318	41.760	85.078
Balikpapan Timur	53.106	49.853	102.959
Balikpapan Utara	96.167	92.438	188.605
Balikpapan Tengah	53.867	51.882	105.749
Balikpapan Barat	50.584	47.237	97.821
Kota Balikpapan	377.458	361.074	738.532

Sumber: BPS Kota Balikpapan

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Balikpapan Tahun 2023

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	30.732	29.455	60.187
5-9	28.582	27.315	55.897
10-14	28.400	26.795	55.195
15-19	29.608	27.068	56.676
20-24	29.873	27.194	57.067
25-29	30.557	28.610	59.167
30-34	29.884	28.790	58.674
35-39	29.036	28.002	57.038
40-44	27.620	26.793	54.413

45-49	25.273	24.484	49.757
50-54	21.036	20.560	41.596
55-59	17.057	17.126	34.183
60-64	13.673	13.702	27.375
65-69	9.928	9.666	19.594
70-74	6.497	6.326	12.823
75+	5.011	5.382	10.393
Kota Balikpapan	362.767	347.268	710.035

Sumber: BPS Kota Balikpapan

2.2 Gambaran Umum Kebijakan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)

Gambar 2.2 Istana Garuda Ibu Kota Nusantara



Sumber: economy.okezone.com (2023)

Kebijakan pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur ialah salah satu inisiatif strategis pemerintah dalam mengurangi beban Jakarta dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di kawasan timur Indonesia. Urgensi pemindahan ibu kota disebabkan karena terkonsentrasinya kegiatan ekonomi di Jakarta dan Pulau Jawa, sehingga menimbulkan kesenjangan ekonomi antara Pulau Jawa dan wilayah luar Pulau Jawa. Tak hanya itu, terdapat penelitian yang menunjukkan bahwa Jakarta sudah tidak bisa lagi menjalankan perannya sebagai ibu kota negara. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang cepat dan tidak terkendali, menurunnya kondisi dan fungsi lingkungan hidup, serta menurunnya kenyamanan hidup.

IKN dipindahkan di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan total luas wilayah daratan 252.660 ha dan 69.769 ha wilayah perairan laut (Buku Laporan Capaian Otoritas Ibu Kota Negara 2023). Terdapat pilar pembangunan Indonesia 2045, yaitu pembangunan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan, serta penguatan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan..

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No.1. Nomor 63 Tahun 2022 merinci rencana induk ibu kota nusantara yang akan dikembangkan dan dikelola dengan visi “Kota Dunia untuk Semua”. Visi tersebut menekankan bahwa pertumbuhan dan perkembangan ibu kota Indonesia akan diatur oleh standar global, menjadi mesin perekonomian Kalimantan dan menjadi pemicu penguatan rantai domestik di seluruh wilayah Indonesia bagian timur. Visi ibu kota nusantara selanjutnya dijabarkan dengan tiga tujuan utama, yaitu:

1. Mewujudkan lambang citra negara kota yang mencerminkan jati diri, identitas sosial budaya, keberagaman, persatuan dan kesatuan serta kebesaran bangsa Indonesia, berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika;
2. Mengembangkan kota-kota berkelanjutan di dunia: kota-kota yang secara efektif mengelola sumber daya dan memberikan pelayanan secara efektif melalui penataan ruang dan lahan, efisiensi penggunaan air dan energi, pengelolaan sampah dan sanitasi yang bersih dan sehat, pengembangan moda transportasi terpadu, dan membangun lingkungan hidup dan kehidupan yang layak huni, sehat, nyaman, aman dan berkelanjutan;
3. Menggerakkan ekonomi Indonesia masa depan: kota yang Mendorong transformasi sosial ekonomi menjadi lebih progresif, inovatif dan kompetitif dengan mengoptimalkan pengembangan dan penggunaan teknologi,

arsitektur, perencanaan kota dan keragaman sosial budaya. Ibukota nusantara ini akan didukung oleh pengembangan ekonomi super-pusat, menjamin penguatan rantai nilai ekonomi domestik dan global melalui optimalisasi tenaga kerja, infrastruktur, sumber daya dan jaringan, serta memberikan peluang peningkatan nilai tambah, pendapatan dan kesejahteraan bagi semua.

Strategi pengembangan ekonomi dilakukan dengan prinsip dasar ekonomi pengembangan Ibu Kota Nusantara sebagai Superhub Ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan akan diungkit dengan pengembangan Ibu Kota Nusantara sebagai superhub ekonomi, yang akan menjadi bagian integral dari upaya transformasi ekonomi di Ibu Kota Nusantara dan Provinsi Kalimantan Timur serta daerah-daerah mitra di Pulau Kalimantan. Strategi ini didorong oleh kerja sama tiga kota yang kuat antara Ibu Kota Nusantara, Balikpapan, dan Samarinda. Ibu Kota Nusantara akan berperan sebagai 'saraf' bagi kawasan pusat pemerintahan dan pusat inovasi hijau, kemudian Samarinda sebagai 'jantung' dengan perannya sebagai pusat sejarah Kalimantan Timur dengan sektor energi terbarukannya, dan Balikpapan sebagai 'otot' (pusat kegiatan) yang berfungsi sebagai simpul hilir migas dan logistik untuk Kalimantan Timur. Dalam ekonomi superhub IKN ini terdapat beberapa visi, sebagai berikut:

6 Klaster Ekonomi :

- Kluster Industri teknologi Bersih
- Kluster Farmasi Terintegrasi
- Kluster industri Pertanian Berkelanjutan
- Kluster Ekowisata dan Wisata Kesehatan
- Kluster Bahan Kimia dan Produk Turunan Kimia
- Kluster Energi rendah Karbon

2 Klaster Pendukung :

- Kluster Pendidikan Abad ke-21
- Smart City dan Pusat Industri 4.0

Selain itu, Adapun delapan prinsip Ibu Kota Negara, yaitu:

1. Mendesain sesuai dengan kondisi alam;
 - Lebih dari 75% kawasan hijau di Kawasan Pemerintahan IKN
 - 100% penduduk dapat mengakses ruang terbuka hijau rekreasi dalam 10 menit
 - 100% konstruksi ramah lingkungan untuk setiap bangunan bertingkat institusional, komersial, dan hunian
2. Bhineka Tunggal Ika
 - 100% integrasi seluruh penduduk, baik penduduk lokal maupun pendatang
 - 100% warga dapat mengakses layanan sosial atau masyarakat dalam 10 menit
 - 100% tempat umum dirancang menggunakan prinsip akses universal, kearifan lokal, dan desain inklusif
3. Terhubung, aktif, dan mudah diakses
 - 80% perjalanan dengan transportasi umum atau mobilitas aktif
 - 10 menit ke fasilitas penting dan simpul transportasi umum
 - <50 menit koneksi transit ekspres dari Kawasan Inti Pusat Pemerintahan ke bandara strategis pada 2030
4. Rendah emisi karbon
 - Instalasi kapasitas energi terbarukan akan memenuhi 100% kebutuhan energi IKN
 - 60% peningkatan efisiensi energi dalam bangunan umum yang baru di 2045
 - Net Zero Emissions di IKN pada 2045
5. Sirkuler dan tangguh

- 10% dari lahan seluas Kawasan Pemerintahan IKN tersedia untuk kebutuhan produksi pangan
- 60% daur ulang semua timbulan sampah di 2045
- 100% air limbah akan diolah melalui sistem pengolahan pada 2035

6. Aman dan terjangkau

- 10 Kota terbaik menurut Global Liveability Index pada 2045
- Semua permukiman di Kawasan Pemerintahan IKN memiliki akses terhadap infrastruktur penting di 2045
- Perumahan yang adil dengan perbandingan 1:3:6 untuk jenis perumahan mewah, menengah, dan sederhana

7. Kenyamanan dan efisiensi melalui teknologi

- Memperoleh peringkat *Very High* dalam perangkat e-Gov Development Index oleh PBB
- 100% Konektivitas digital dan TIK untuk semua penduduk dan bisnis
- Lebih dari 75% kepuasan bisnis dengan peringkat layanan digital

8. Peluang ekonomi untuk semua

- 0% Kemiskinan di IKN pada 2035
- PDB per Kapita negara berpendapatan tinggi
- Rasio Gini regional terendah di Indonesia pada 2045

Pembangunan Ibu Kota Negara berlangsung hingga tahun 2045 dengan 5 tahapan, yakni:

1. 2022-2024

Tahap awal relokasi ke kawasan IKN, pembangunan infrastruktur besar seperti Istana Kepresidenan, gedung dan perumahan MPR/DPR RI, juga mencakup tahap awal mutasi

ASN, tahap awal pembangunan dan pengoperasian infrastruktur untuk 500.000 jiwa. Presiden Republik Indonesia akan merayakan hari jadinya yang ke-79 pada 17 Agustus 2024.

2. 2025-2035

Mengembangkan IKN menjadi kawasan inti yang tangguh, mengembangkan fase perkotaan berikutnya sebagai pusat inovasi dan ekonomi, menyelesaikan pemindahan pusat pemerintahan IKN, mengembangkan sektor-sektor ekonomi prioritas, dan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

3. 2035-2045

Membangun infrastruktur dan ekosistem tiga kota untuk menjadi tujuan investasi asing langsung nomor satu di Indonesia pada sektor ekonomi prioritas dan masuk dalam lima besar tujuan utama di Asia Tenggara. Mendorong jaringan utilitas yang berkelanjutan melalui penerapan inisiatif ekonomi sirkular dan pengembangan pusat inovasi dan pengembangan bakat.

4. 2045 dan selanjutnya

Memperkuat reputasi “Kota Dunia” dan menjadi kota dengan daya saing global terdepan. Masuk dalam sepuluh besar kota layak huni dan mencapai emisi karbon nol bersih dan 100% energi terbarukan dalam kapasitas terpasang, menjadi kota pertama di dunia dengan populasi lebih dari 1 juta yang mencapai tujuan ini.